

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Dalam membuka dan menggambarkan penulisan skripsi, pada bab ini akan menjelaskan berbagai informasi dasar yang akan membantu kelengkapan penyelesaian penulisan skripsi ini nantinya. Diawali dengan penjelasan latar belakang masalah dari adanya klaim China pada Laut China Selatan, kemudian rumusan masalah telah dirumuskan dalam skripsi ini untuk dapat dijawab. Untuk menjawab masalah yang sudah dirumuskan, akan dibutuhkan kerangka pemikiran sebagai alat untuk menjawab, dan hipotesa awal. Penulisan bab ini diakhiri dengan penjelasan terkait dengan tujuan penelitian, batasan penelitian, dan metode penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan skripsi ini.

### **A. Latar Belakang**

Dalam beberapa tahun terakhir, konflik Laut China Selatan merupakan salah satu isu yang sangat penting di dunia internasional. Kawasan Laut China Selatan berbatasan dengan daratan dari tujuh negara, diantaranya China, Taiwan, Vietnam, Kamboja, Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Berbatasan langsung dengan daratan dari tujuh negara tersebut menjadikan Laut China Selatan sangat rentan dengan terjadinya persengketaan. Laut merupakan jalur penting untuk sebagian besar pengiriman komersial dunia - berbatasan dengan beberapa negara. Karena kepentingan ekonomi dan geostrategisnya, Laut China Selatan menjadi tempat dari beberapa sengketa teritorial yang kompleks yang telah menjadi penyebab konflik dan ketegangan politik serta militer di dalam kawasan dan di seluruh Indo-Pasifik (Faruk Zorlu, 2019). Konflik besar mulai terjadi lagi ketika China melakukan pengeklaiman terhadap Laut China Selatan yang didasarkan dengan faktor sejarah. Dimana pada saat klaim tersebut terjadi, Filipina berada di antara Amerika Serikat dan China yang merupakan dua kekuatan besar

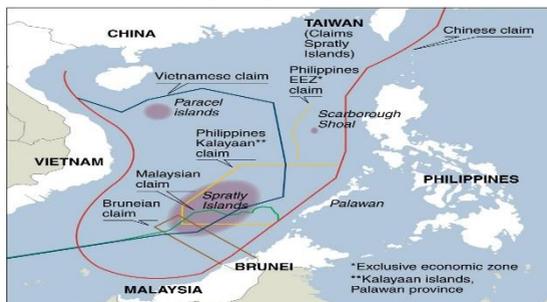
dalam kawasan tersebut. Laut China Selatan merupakan salah satu laut terbesar yang ada di dunia karena memiliki luas sekitar 3,5 juta kilometer persegi. Adanya kekayaan sumber daya alam yang melimpah didalamnya, baik berupa ikan, minyak, gas alam, hasil laut, maupun berupa sektor energi. Kawasan tersebut juga merupakan jalur untuk pelayaran dan perdagangan yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia (Sichun, 2013).

Secara historis, wilayah tersebut disebut dengan nama Laut China Selatan karena lokasinya yang berada pada selatan China. Laut China Selatan jika dilihat secara geografis membentang dari Selat Malaka di bagian barat daya sampai Selat Taiwan di bagian timur laut dengan luas sekitar 3500000 kilometer persegi. Banyaknya sumber daya alam yang ada di dalam Laut China Selatan menjadikannya sebagai kekayaan yang menjanjikan bagi negara yang ingin memilikinya. Bahkan letaknya yang strategis juga dapat menimbulkan adanya kepentingan geopolitik yang sangat signifikan. Laut China Selatan ini terdiri dari ratusan pulau-pulau kecil dan terumbu karang. Dimana pulau-pulau yang ada didalamnya tidak dapat ditinggali ataupun digunakan untuk aktivitas-aktivitas. Adanya klaim terhadap pulau-pulau tersebut dari negara-negara yang berbatasan langsung dikarenakan mereka ingin menguasai kawasan laut tersebut dan mengambil sumber daya yang ada didalamnya (Rostiani, 2015).

Untuk pengiriman atau *shipping* di Laut China Selatan, pengiriman menyebar lebih dari 3,5 juta kilometer persegi, hampir sepertiga dari pengiriman dunia, diperkirakan pengiriman perdagangan tahunan senilai \$ 11,3 miliar setiap tahun melewati jalur air ini menurut Pusat Studi Strategis dan Internasional. Korea Selatan dan Jepang yang bergantung pada Laut China Selatan karena merupakan jalur ekspor dan untuk suplai bahan bakar dan bahan mentah negara mereka. Sekitar \$ 5,3 triliun perdagangan pelayaran melalui Laut China Selatan setiap tahun, dengan \$ 1,2 triliun dari total akuntansi untuk perdagangan dengan Amerika Serikat (Faruk Zorlu, 2019).

Jumlah kekayaan sumber daya alam yang ada di Laut China Selatan diperkirakan Amerika Serikat sebanyak 11 miliar barel (bbl) cadangan minyak dan 190 triliun kaki kubik (Tcf) cadangan gas alam, jumlah tersebut masih bisa bertambah karena belum semua kawasan Laut China Selatan yang tereksplorasi. *U.S Geological Survey* (USGS) juga memperkirakan kekayaan Laut China Selatan sekitar 5-22 miliar barel (bbl) untuk cadangan minyak, dan untuk gas alam 70-290 triliun kaki kubik (Tcf). Ditemukannya kekayaan minyak dan gas alam di beberapa blok laut China selatan menurut survei yang dilakukan USGS menjadikan “*pull factor*” semakin tinggi bagi negara-negara disekitarnya untuk mengklaim wilayah laut China selatan. Dengan kekayaan minyak dan gas alam yang diperkirakan oleh AS melebihi cadangan minyak di Meksiko dan diperkirakan cadangan minyak dan gas alam di Laut China Selatan menjadi urutan kedua terbesar setelah Arab Saudi. *Chinese National Offshore Oil Company* (CNOOC) juga memperkirakan jumlah sumber daya dari Laut China Selatan terdapat cadangan minyak 125 miliar barel (bbl), dan gas alam 500 triliun kaki kubik (Tcf) dari sumber daya yang belum ditemukan ((EIA), 2013).

Gambar 1.1 klaim yang disengketakan di laut China Selatan



Sumber: (EIA), U. E. (2013, february 7). *South China Sea*. Diambil kembali dari U.S. Energy Information Administration (EIA): <https://www.eia.gov/beta/international/regiontopics.php?RegionToPicID=SCS>

Mengingat Laut China Selatan merupakan pusat geopolitik dan geoekonomi untuk banyak negara, karena

inilah setiap gejala perubahan politik internasional dan munculnya ancaman akan berpengaruh terhadap ASEAN. Dalam konteks sengketa Laut China Selatan, ada empat negara anggota ASEAN yang tertarik, termasuk: Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina termasuk Indonesia (Firestein, 2016). Kawasan yang sangat strategis dan banyak memiliki potensi, menjadikan banyak negara yang ingin menguasai kawasan tersebut untuk kepentingan negaranya di Laut China Selatan, salah satunya adalah Filipina. Filipina merupakan salah satu negara yang menunjukkan *interest*-nya dalam konflik Laut China Selatan dengan cara mengambil sikap tegas menyatakan kedaulatan wilayah mereka dari kalim yang dilakukan oleh China. Saat ini dalam pusat sengketa maritim di Laut China Selatan, Filipina memiliki klaim atas pulau Kalayaan Island, Scarborough Shoal, dan Second Thomas Shoal. Dari klaim tersebut membuat Filipina terseret sengketa dengan beberapa negara di kawasan tersebut. Kemudian pemerintah Filipina memberlakukan undang-undang baru pada tahun 2009 dengan tujuan untuk mengubah klaim atas pulau sebelumnya dalam undang-undang No.9522. Dimana undang-undang tersebut menetapkan garis pangkal kepulauan yang disesuaikan dengan Pasal 47 UNCLOS (Rosen, 2014).

Pada tahun 1970-an, cadangan minyak dan gas alam mulai ditemukan di landas kontinen Filipina. Pada tahun 2011, Filipina pernah membuat pernyataan kepada ASEAN untuk mengembalikan Laut China Selatan sebagai kawasan perdamaian, kebebasan, persahabatan, dan kerja sama. Tetapi, upaya tersebut belum cukup berhasil dalam mendamaikan pandangan para negara penuntut versus non-penuntut di Asia Tenggara. Sejauh ini, Filipina masih berusaha mencegah agresivitas China di Laut China Selatan dengan tetap menjaga hubungan diplomatik dengan China.

Pertimbangan Filipina untuk mempertahankan wilayah yang diklaim didasarkan pada penegakan kedaulatan wilayah dan penggunaan sumber daya produksi dalam pasokan minyak dan gas di *Reed Bank*. Meskipun banyak negara penuntut telah

menjalin hubungan ekonomi dengan China, Filipina masih meragukan kekuatan militer China yang meningkat di Laut China Selatan. Mengingat Pemerintah China pada tahun 1947 mereka menyatakan telah mengeluarkan peta yang menunjukkan klaim China atas Laut China Selatan (Roza, 2013). Klaim tersebut membuat Filipina merasa terancam atas klaim China tersebut karena kekuatan dan kemajuan militernya tidak sepadan dengan kekuatan militer dari Filipina. Dalam keadaan tersebut, Filipina telah menerapkan "standar ganda" untuk mempertahankan dominasinya atas China agar terus memperoleh manfaat ekonomi (Suharman, 2019). Filipina juga telah merancang agenda keamanan eksternalnya berdasarkan kepercayaannya pada hukum internasional dan percaya bahwa China telah mengeksploitasi sumber daya alam secara ilegal di Zona Ekonomi Eksklusifnya dan mengancam kebebasan navigasi di Zona Ekonomi Eksklusif (Pemmaraju, 2016).

Sengketa wilayah di Laut China Selatan juga melibatkan perebutan kekuasaan ekstra-regional. Amerika Serikat adalah salah satu kekuatan ekstra-regional yang mempengaruhi keamanan di Laut China Selatan. Terkait persaingan antara kekuatan ekstra-regional dan negara kuasa besar, membuat ASEAN dilema dalam menentukan kesepakatan bersama menjadi lebih rumit. Ketergantungan ekonomi ASEAN pada *China-ASEAN Free Trade Area* (CAFTA) juga telah melemahkan kemampuan ASEAN untuk menahan tindakan provokatif China di Laut China Selatan, sehingga memecah penyatuan ASEAN. Di sisi lain, Amerika Serikat menggunakan negara penyangga dan aliansi regional untuk mencegah ekspansi China.

Bentuk kekuatan ekstra-regional adalah perebutan antar kekuatan hegemoni untuk mendapatkan sumber produksi dan rute maritim. Amerika Serikat berusaha untuk mempertahankan status unipolar dalam sistem internasional dengan memperluas kehadiran militernya di hampir seluruh wilayah dunia, termasuk Filipina. Di sisi lain, China berusaha

memainkan kekuatan utama dan peran utama dalam urusan regional (Umi Qodarsasi, 2018).

Sebaliknya, klaim Amerika Serikat atas Laut China Selatan adalah upaya untuk menekankan pentingnya kebebasan navigasi dan menyeimbangkan kembali kekuatannya di Asia tanpa satu pun kekuatan dominan (Gregory Poling, 2019). Fakta ini telah meningkatkan kewaspadaan China, memperkuat kontrolnya atas kehadiran pasukan AS di wilayah tersebut, dan memperkuat kontrolnya atas Laut China Selatan dan wilayah udaranya. Filipina telah memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat, karena telah menjalin hubungan kerja sama antar kedua negara, termasuk dalam sengketa Laut China Selatan. Dimana pemerintah Filipina menyatakan sikap serius terhadap sengketa tersebut yang mengancam kedaulatan negaranya dengan cara menjalin kerja sama guna untuk memperkuat pertahanan. Kedua negara sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang militer untuk kepentingan nasional negara tersebut (Albert, 2016). Kerjasama keduanya didasarkan kepentingan masing-masing negara, dimana Filipina berfokus pada keamanan dan kepentingan nasionalnya. Oleh karena itu, persaingan antara Amerika Serikat dan China untuk memperebutkan status kekuatan utama di Laut China Selatan bermula dari pemahaman strategis pengelolaan konflik dan sumber daya regional.

Amerika Serikat yang sudah lama menjalin kerjasama dengan mendukung militer Filipina dalam sengketa Laut China Selatan secara tidak langsung juga membawa ancaman bagi Filipina. Dukungan militer tersebut diberikan oleh Amerika Serikat karena Amerika Serikat tahu bahwa Filipina akan menerima kerjasama tersebut Filipina sadar jika militernya tidak sebanding dengan China untuk menghadapi konflik di Laut China Selatan. Jika suatu saat Filipina mulai berpihak kepada negara kuasa lainnya, maka bisa saja kerjasama dalam bidang militer tersebut berakhir dan militer Filipina kembali lemah dalam sengketa Laut China Selatan.

Semakin berjalannya waktu, Filipina akhirnya tersadar akan posisinya di wilayah Laut China Selatan yang berada diantara kepentingan dua negara besar. Filipina tidak bisa terus menerus bergantung kepada Amerika Serikat untuk menjaga kedaulatan negaranya. Filipina harus menerapkan strategi atau kebijakan yang fleksibel dengan tujuan agar dapat memberikan keuntungan bagi negara dan juga membantu pemerintahan Filipina sendiri mencapai kepentingan nasionalnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang diatas, maka persoalan dari makalah ini akan membahas: “**Bagaimana Strategi Hedging Filipina di Laut China Selatan (2017-2019)?**”

## **C. Kerangka Pemikiran**

### **1. Konsep Hedging**

Setelah terjadinya Perang Dingin, kekuatan dunia yang semula bersifat bipolar, mulai berubah menjadi unipolar dengan AS sebagai pionir utama. Namun, para peneliti memperkirakan sistem ini tidak akan berada dalam kondisi lama, karena pada hakikatnya sistem internasional dapat selalu berubah seiring berkembangnya zaman, terutama dengan ancaman munculnya negara *raising power* untuk menghambat sistem unipolar ini. (McDougall, 1997)

Dalam hubungan internasional, ada penjelasan tersendiri terkait dengan tindakan yang seringkali diambil oleh setiap negara sebagai aktor utama dalam sistem internasional, apabila berbicara tentang keamanan dan berbagai bentuk ancaman terhadap kepentingan nasional suatu negara, antara lain:

Pertama, adalah ‘*balancing*’. Negara dengan konsep ini percaya bahwa negara yang memiliki kekuatan besar di dalam sistem internasional tidak akan selamanya dapat

berkuasa karena akan muncul negara penyeimbang yang sama-sama memiliki kekuatan besar. (Waltz, 1979)

Selanjutnya adalah '*banwagoning*', negara yang menggunakan konsep ini percaya bahwa negara-negara kecil yang tahu bahwa kekuatan mereka tidak seimbang dengan kekuatan negara besar maka mereka akan berusaha mendekati kekuatan negara besar tersebut untuk berlindung dan melakukan kerjasama sehingga kepentingan negara mereka akan aman dan negara kekuatan besar tidak menganggap mereka sebagai ancaman. (Walt, 1987)

Sementara yang ketiga, yakni '*hedging*'. Hedging tak lain merupakan sebuah strategi responsif yang dapat digunakan oleh suatu negara apabila negara tersebut berada dalam ancaman, terutama ancaman dari negara lain. (Sieberg, 2011)

Meskipun konsep ini pertama kali populer bukan dalam disiplin ilmu hubungan internasional, namun oleh John Hemmings konsep ini mulai diperkenalkan. Hemmings menggambarkan *hedging* sebagai sebuah situasi dimana suatu negara yang merasa terancam dari kehadiran maupun tindakan negara lain, akan melakukan dan menjalankan berbagai kebijakan untuk merespon negara tersebut dengan berbagai resiko yang ada (Hemmings, 2013).

Hedging sendiri merupakan konsep yang berada ditengah-tengah antara *balancing* dan *bandwagoning*. Karena dalam situasi ini, negara harus memilih untuk mempersiapkan yang terburuk dengan *balancing* mempertahankan militer yang kuat, membangun serta memperkuat aliansi- atau melakukan *banwagoning* dengan mempersiapkan jaringan perdagangan yang terbaik dan menarik untuk negara kecil agar mau mendukung mereka. Termasuk dengan membangun, meningkatkan hubungan diplomatik, dan menciptakan kerangka kerja multilateral

yang mengikat, atau bahkan suatu negara juga dapat menjalankan keduanya secara bersamaan.

Menurut Tessman dan Wolfe dalam tulisannya yaitu *Great Powers and Strategic Hedging: The Case of Chinese Energy Security Strategy 2011*, ada empat cara sebuah negara melakukan strategi *hedging* (Tessman, 2011), yaitu:

*Hedging A*, perilaku negara yang meningkatkan kemampuan militernya untuk menghadapi potensial konflik di masa depan dengan negara yang menjadi potensi ancaman dan/atau meningkatkan strategi cadangan sumber daya untuk melepaskan bantuan yang diberikan oleh pemimpin sistem.

*Hedging B*, suatu negara akan menghindari provokasi atau konfrontasi langsung dari negara yang dianggap potensial sebagai ancaman dengan cara bergabung dengan aliansi militer untuk melawan negara potensial ancaman tersebut atau meningkatkan kekuatan militernya.

*Hedging C*, adalah penggunaan strategi *hedging* dikoordinasikan secara terpusat, artinya masalah yang sedang dihadapi sebuah negara dalam berhubungan negara *raising power* harus menjadi perhatian utama kepentingan negara sehingga pembahasan kebijakan yang tepat dikoordinasikan dengan seluruh organ pemerintah yang bertanggung jawab.

*Hedging D*, adalah negara harus siap menanggung biaya yang dikeluarkan domestik maupun biaya internasional dalam penggunaan strategi *hedging* jangka pendek.

Dalam penelitian ini nantinya, penulis akan fokus kepada *hedging* tipe A, yang dapat disimpulkan bahwa strategi *hedging* membuat suatu negara menghindari kemungkinan terburuk dalam berhubungan dengan cara meningkatkan kemampuan militernya dan cadangan sumber

daya untuk melepaskan bantuan yang diberikan oleh pemimpin sistem. Kekhawatiran Filipina bertambah besar ketika Amerika Serikat melihat fakta perkembangan ekonomi dan kenaikan anggaran militer yang terjadi di China sudah sampai ke tahap yang cukup membahayakan bagi Amerika Serikat. Belum lagi fakta China sedang terlibat dalam sengketa besar di wilayah Laut China Selatan, yang bisa kapan saja membahayakan kepentingan Amerika Serikat di kawasan Laut China Selatan. Makadari itu Amerika Serikat menggandeng Filipina untuk memberikan dukungan keamanan di negara Filipina melalui kerja sama militernya.

## **2. Konsep Diplomasi**

Diplomasi merupakan seni mengedepankan kepentingan negara melalui negosiasi dengan cara-cara damai atau dengan cara-cara lain seperti perang atau kekerasan. Selain merupakan sebagai salah satu instrumen utama yang penting dalam pelaksanaan kepentingan nasional suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional yang berhubungan dengan negara lain atau organisasi internasional. Dengan menggunakan diplomasi setiap negara dapat membentuk citra dari negara tersebut. Diplomasi biasanya digunakan oleh sebuah negara ketika akan melakukan hubungan bilateral dengan negara lain.

Diplomasi mewujudkan praktek pelaksana perundingan yang dilakukan antar negara melalui perwakilan resmi. Perwakilan resmi dari negara dipilih oleh negara itu sendiri tanpa campur tangan pihak lain. Diplomasi yang dilakukan antar negara bisa mencakup proses hubungan luar negeri seperti pembuatan kebijakan luar negeri dan pelaksanaannya. Diplomasi juga mencakup teknik operasional untuk mencapai kepentingan nasional yang ada di luar batas wilayah yuridiksi. Adanya ketergantungan yang semakin tinggi dalam lingkup antar negara, sehingga menyebabkan semakin bertambahnya pertemuan dan konferensi internasional.

Diplomasi juga merupakan hubungan, relasi,

keterkaitan, atau komunikasi. Serta proses interaktif dua arah dari dua negara yang ingin mencapai politik luar negeri setiap negaranya (S.L, 1995). Diplomasi dan politik luar negeri tidak dapat dipisahkan misal diibaratkan seperti dua sisi dalam mata uang, karena politik luar negeri merupakan isi utama dari mekanisme pelaksanaan politik luar negeri suatu negara, dan diplomasi adalah proses pelaksanaan politik luar negeri. Oleh karena itu, diplomasi dan politik luar negeri saling terkait dan saling mendukung. Diplomasi terus berkembang berdasarkan saling ketergantungan antara satu negara dengan negara lainnya. Dalam kegiatan diplomatik, salah satu proses yang sering dilakukan adalah dengan menggunakan metode negosiasi disamping bentuk kegiatan diplomatik lainnya (seperti pertemuan, kunjungan, dan kesepakatan). Oleh karena itu, negosiasi merupakan salah satu alat diplomatik untuk menyelesaikan masalah secara damai dan dapat memajukan kepentingan nasional.

KM. Panikkar dalam bukunya yang "*The principal and practice of diplomacy*" mengatakan bahwa hubungan diplomasi dengan politik internasional, yaitu seni mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain (K. M. Panikkar Bombay, 1956).

Sir Ernest Satow dalam bukunya "*Guide to Diplomatic Practice*", menjelaskan pengertian dari diplomasi bahwa, "*the application of intelligence and tact to conduct of official relations between the government of independent states*" (S.L, 1995)

Russett dan Starr percaya bahwa diplomasi adalah sarana suatu negara untuk mempengaruhi negara lain di dunia. Diplomasi adalah komponen yang sangat penting yang digunakan untuk mencari solusi atau solusi damai. Diplomasi adalah mewujudkan kepentingan nasional dalam suatu negara. Meskipun diplomasi melibatkan aktivitas damai, namun dapat juga terjadi dalam peperangan atau konflik bersenjata, karena tugas utama

diplomasi tidak hanya manajemen konflik, tetapi juga manajemen dan pemeliharaan perubahan yang berkelanjutan melalui persuasi dalam perubahan yang berkelanjutan (Adam, 1983). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa diplomasi merupakan perpaduan ilmu dan seni negosiasi, atau sarana penyampaian informasi melalui perundingan, untuk mewujudkan tujuan dan kepentingan nasional yang berkaitan dengan politik, ekonomi, perdagangan, kemasyarakatan, kebudayaan, pertahanan negara, militer dan berbagai kepentingan lainnya dalam kepentingan hubungan internasional.

Untuk mencapai tujuan diplomatiknya, suatu negara dapat dicapai dengan berbagai cara. Menurut Kautilya, dalam bukunya "*Kautilya's concept of diplomacy : Assesing interpretation*" bahwa tujuan utama dari diplomasi yaitu pengamanan kepentingan negara itu sendiri (Anusmita Dutta, 2017). Dapat juga dikatakan bahwa tujuan diplomasi adalah untuk menjamin kepentingan terbaik negara itu sendiri. Selain itu, ada kepentingan lain, seperti kepentingan ekonomi, perdagangan dan komersial, perlindungan warga negara yang tinggal di negara lain, pengembangan budaya dan ideologi, serta peningkatan prestise persahabatan dengan negara lain.

Disini Filipina juga tumpang tindih atas klaim dengan China di Laut China Selatan. Pada bulan Juni 1978, Presiden Filipina Ferdinand E. Marcos mengeluarkan dekrit presiden yang secara resmi mendeklarasikan kedaulatan atas beberapa pulau di Kepulauan Spratly dan memasukkannya ke bagian barat Palawan. Klaim tersebut berdasarkan koordinat yang ditemukan oleh tim di Filipina yang dipimpin oleh ahli maritim Tomas Cloma. Cloma menyebut Kepulauan Nansha sebagai "*freedomland*", yang kemudian diklaim oleh pemerintah Filipina. Jika terjadi perselisihan dengan China, Filipina mengusulkan untuk menggunakan mekanisme penyelesaian sesuai dengan UNCLOS.

Seperti pada posisi Filipina saat ini yang menjadikan China sebagai *raising power*, dengan cara melakukan diplomasi untuk menjalin hubungan kerjasama dengan China dalam sektor ekonomi, di bidang perdagangan. Kerjasama tersebut agar China mendorong perusahaan untuk berinvestasi agar dapat mengembangkan infrastruktur dan sumber daya manusia di Filipina. Sebenarnya ini sangat bertolakbelakang dengan fokus Filipina yang sebelumnya lebih fokus dalam keamanan, namun sekarang menjadi fokus ke ekonomi. Selain itu, Filipina juga melaporkan kasus sengketa Laut China Selatan ke arbitrase internasional. Filipina juga mendukung ASEAN dalam penyusunan Code of Conduct untuk melindungi kepentingan nasionalnya. Darisinitilah terlihat bagaimana Filipina berdiplomasi untuk menggunakan kepentingan nasionalnya untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

#### **D. Hipotesa**

Strategi hedging Filipina di Laut China Selatan (2017-2019), yaitu:

1. Meningkatkan kemampuan militernya dengan cara bekerjasama dengan Amerika Serikat dalam bidang militer dan alutsista dengan mendirikan pangkalan militer di Filipina, dan bidang sumber daya manusia dengan cara melakukan latihan militer bersama.
2. Mengubah strategi menjadi strategi diplomasi dengan negara China, yang awalnya berfokus pada keamanan menjadi fokus ke ekonomi dan pembangunan.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan posisi Filipina di dalam sengketa wilayah Laut China Selatan serta menjelaskan bagaimana hubungan bilateral antara Filipina, Amerika Serikat, dan China di kawasan tersebut.

2. Serta untuk mengetahui kebijakan luar negeri yang diambil Filipina dalam kasus Laut China Selatan.

### **F. Jangkauan Penelitian**

Jangkauan penelitian ini dimulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Rentang waktu tersebut menunjukkan proses kebijakan pemerintah Filipina terhadap dalam isu Laut China Selatan. Tahun 2017-2018 menjelaskan bagaimana persengketaan yang terjadi di Laut China Selatan. Kemudian, tahun 2019 merupakan hasil yang diperoleh dari kebijakan pemerintah Filipina di Laut China Selatan.

### **G. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisa kualitatif secara deskriptif, dimana penulis mencoba menjelaskan strategi Filipina di Laut China Selatan. Dalam menggunakan metode, penulis menggunakan teknik *library research* seperti studi dokumen yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder, dalam hal ini, informasi tersebut berasal dari beberapa bahan yang diterbitkan relevan seperti buku, artikel jurnal, laporan, berita, situs resmi, dan undang-undang dan regulasi yang terkait dengan subjek penelitian.

menghindari perlebaran penjelesan agar sesuai dengan tema yang akan dibahas, maka penulis akan menggunakan rentang waktu pada 2017-2019. Jenis penelitian yang digunakan dalam penyelidikan ini jelas, di mana penulis berusaha untuk menjelaskan kebijakan yang diambil Filipina terhadap China dalam isu laut China Selatan pada tahun 2017-2019. Penulis juga menggunakan strategi prosedur akumulasi informasi, seperti catatan pemikiran yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi tambahan. Dalam hal ini, penulis mendapatkan data dari beberapa bahan kritis yang didistribusikan, seperti buku, artikel jurnal, laporan, berita, situs resmi, undang-undang dan peraturan yang diidentifikasi dengan subjek eksplorasi.

## **H. Sistematika Penulisan**

Pada bab pertama, penulis akan membahas mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua penulis akan membahas mengenai dinamika konflik Laut China Selatan, Faktor penyebab Laut China Selatan diperebutkan, Posisi Filipina di Laut China Selatan, serta hubungan Filipina dengan Amerika Serikat dan China dalam konflik Laut China Selatan.

Bab ketiga penulis akan membahas mengenai bagaimana Filipina dapat memainkan strategi hedging dengan Amerika Serikat dan diplomasi dengan China untuk dapat mencapai kepentingan nasionalnya di kawasan Laut China Selatan serta alasan dari perubahan kebijakan luar negeri Filipina.

Pada bab keempat akan berisi kesimpulan terkait hasil dari pembahasan penelitian yang akan menjawab pertanyaan penelitian dan saran untuk penelitian yang akan datang.